

## Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una

Renaldy S. Kamaru<sup>1</sup>, Tety Thalib<sup>2</sup>, Kurniadi K. Hasan<sup>3</sup>,

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Renaldy S., Kamaru, e-mail: [enalrenaldy219@gmail.com](mailto:enalrenaldy219@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[tetythalib72@gmail.com](mailto:tetythalib72@gmail.com)<sup>2</sup>, [yadiehz@gmail.com](mailto:yadiehz@gmail.com)<sup>3</sup>.

Published: July , 2025

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Dolong A Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-Una. Metode yang digunakan Kualitatif Deskriptif dengan 3 fokus penelitian yaitu pemerintah sebagai motivator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah mobilisator. Sumber data yang digunakan ialah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai Motivator dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui belum merata karena lemahnya kehadiran dan keterlibatan langsung dari kepala desa dan sekretaris desa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, peran pemerintah desa sebagai fasilitator belum semua proses difasilitasi secara optimal, terutama dalam membuka ruang diskusi dan menjembatani aspirasi warga yang masih sering diabaikan, peran pemerintah desa sebagai mobilisator belum berjalan maksimal, minimnya kehadiran pimpinan desa dan kurangnya inisiatif kolektif menyebabkan kegiatan pembangunan bersifat pasif dan cenderung bergantung pada pihak luar.

**Keywords:** Peran Pemerintah; Pembangunan Infrastruktur

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia merupakan pilar utama dalam mencapai kesejahteraan nasional yang berkeadilan. Dalam konteks negara berkembang, pembangunan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan, keadilan sosial, dan keberlanjutan antarwilayah. Desa sebagai entitas terdepan dari struktur pemerintahan menjadi titik awal penting dalam pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat (Simbolon et al., 2021). Aksesibilitas infrastruktur, khususnya jalan Desa, menjadi indikator nyata dari capaian pembangunan ekonomi sosial masyarakat. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi desa akan sulit berkembang secara optimal (Nengsi, 2021).

Pembangunan sosial ekonomi masyarakat Indonesia juga mendapat legitimasi kuat dari landasan konstitusional, khususnya UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga. Arah pembangunan tersebut diperkuat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik (Simbolon et al., 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan sarana fisik, tetapi juga sarana transformasi sosial menuju kesejahteraan.

Dalam tataran praktis, pemerintah pusat berperan strategis sebagai motor penggerak kebijakan pembangunan nasional melalui dokumen perencanaan seperti RPJMN dan RPJPN. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mendorong pembangunan desa adalah dana Desa, yang telah berjalan sejak 2015 sebagai amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Siagian et al., 2022). Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, PUPR, dan Bappenas terus memperkuat intervensi kebijakan agar

pembangunan desa menjadi lebih responsif dan terukur (Ferlita et al., 2024). Infrastruktur jalan termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa, sebagaimana tercatat dalam Permendesa PD TT No. 7 Tahun 2021.

Peran strategis ini juga terlihat dalam peran pemerintah pusat dalam regulasi teknis pembangunan jalan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang jalan. Pemerintah pusat tidak hanya menyediakan anggaran tetapi juga regulasi teknis dan pedoman pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas. Menurut (Sulastri et al., 2025) pemerintah pusat telah memainkan peran vital dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya melalui skema padat karya tunai dan peningkatan kapasitas SDM Desa. Sementara itu, Pemerintah Daerah bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan pusat secara lebih adaptif sesuai dengan karakteristik daerah. Di tingkat kabupaten, infrastruktur jalan Desa sering kali menjadi tanggung jawab konkuren antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa, yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian oleh (Henriawan, 2019) menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan dukungan teknis sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur desa secara menyeluruh.

Akan tetapi, keberhasilan pembangunan jalan Desa sangat ditentukan oleh kapasitas Pemerintah Desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan, desa tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik tetapi juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal dan mengorganisasi sumber daya (Sugiarti, 2023). Pemerintah Desa bertanggung jawab melakukan perencanaan partisipatif, menetapkan skala prioritas, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Studi oleh (Nengsi, 2021) menunjukkan bahwa desa dengan kapasitas kelembagaan yang kuat cenderung lebih berhasil dalam menyerap dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang efektif.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa diharapkan berperan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan arah kebijakan nasional (Hasan, 2023). Pemerintah Desa perlu memastikan bahwa perencanaan pembangunan jalan berbasis musyawarah Desa dan menjamin partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan (Priyanto, 2021). Musyawarah desa menjadi instrumen demokratis yang sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan menetapkan prioritas pembangunan. Studi oleh (Sugiarti, 2023) menunjukkan bahwa musyawarah yang berkualitas akan meningkatkan legitimasi sosial pembangunan.

Selain fasilitator, pemerintah desa juga harus menjadi motivator yang mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk turut terlibat dalam pembangunan. Dorongan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelibatan tokoh masyarakat, serta kampanye pembangunan partisipatif. Dalam konteks ini, pendekatan budaya lokal juga sangat penting agar proses pembangunan tidak terasa dipaksakan. Studi oleh (Nurdiaman et al., 2020) menunjukkan bahwa peran motivasional dari Pemerintah Desa berbanding lurus dengan keberhasilan proyek infrastruktur berbasis gotong royong.

Fungsi ketiga pemerintah desa sebagai mobilisator adalah dalam hal pengorganisasian tenaga kerja lokal dan sumber daya lainnya (Hasan, 2023). Pemerintah desa dapat mendorong pelibatan kelompok masyarakat seperti Karang Taruna atau kelompok tani dalam pelaksanaan pembangunan jalan Desa. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memberikan hasil berupa infrastruktur, tetapi juga efek sosial berupa pemberdayaan dan peningkatan pendapatan lokal. Studi oleh (Sadikin et al., 2021) menemukan bahwa program padat karya pembangunan jalan memberikan dampak signifikan pada pendapatan rumah tangga Desa.

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ada di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una antara lain, minimnya partisipasi dan peran aktif Pemerintah Desa dapat menyebabkan kegagalan pembangunan jalan yang efektif. Sejak pembangunan terakhir pada 2002, tidak ada pembaruan infrastruktur yang signifikan, bahkan kerusakan bertambah akibat aktivitas alat berat tanpa mitigasi. Situasi ini diperburuk oleh tidak adanya inisiatif pemerintah desa untuk mengadakan musyawarah atau mencari solusi bersama masyarakat. Dalam

hal ini, pemerintah desa tidak menjalankan fungsi fasilitator maupun mobilisator secara maksimal.

Keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang berlubang, berbatu, dan becek saat hujan menunjukkan urgensi intervensi pemerintah dalam pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah desa perlu kembali kepada prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam UU Desa, yang menekankan pemberdayaan dan kedaulatan warga dalam pembangunan. Evaluasi program sebelumnya juga sangat penting agar dapat dilakukan perbaikan dan inovasi dalam strategi pembangunan jalan yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur jalan di desa bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga refleksi dari tata kelola pemerintahan lokal. Pemerintah Desa harus memastikan transparansi anggaran, akuntabilitas dalam pelaksanaan, dan pelibatan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, kolaborasi lintas level pemerintahan dari pusat hingga desa perlu diperkuat agar pembangunan menjadi berkesinambungan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis data dan teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan pemantauan.

Dengan memahami peran multidimensional pemerintah, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dolong A bisa berjalan lebih baik. Pemerintah Desa tidak hanya memegang kendali administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam transformasi sosial melalui pembangunan yang inklusif. Fungsi fasilitator, motivator, dan mobilisator harus dihidupkan kembali agar partisipasi warga menjadi kekuatan utama pembangunan. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti memformulasikan judul penelitian “Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan desa Di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa dolong A Kecamatan Walea Kepulauan Tojo Una-Una, Lokasi penelitiain memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data keperluan penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif penulis bisa mengamati pada Lokasi yang akan diteliti jenis penelitian digunakan penulis adalah jenis deskripsi kualitatif, menurut Sugiono (dalam Anggito & Setiawan, 2018) metode penelitiain kualitatif adalah metode penelitiain yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang menjadi focus dari penelitian ini yakni motivator, fasilitator dan mobilisator, sumber data ialah data primer data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui metode seperti wawancara, observasi dan kuesioner, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik menurut (Sugiyono, 2017) data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber aslinya melalui Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian, menurut (Creswell & Creswell, 2017) sumber data primer merupakan Kumpulan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui prosedur pengumpulan data yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian, memberikan bukti empiris yang orisinil, menurut (Sugiyono, 2017) data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumentasi dan wawancara, menurut Sutrisno hadi (dalam Sugiyono, 2019) observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut (Sugiyono, 2019) wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, menurut KBBI V dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

### *State of the Art*

Penelitian yang dilakukan oleh (Lifia, 2023) dengan judul peran pemerintah desa dalam Pembangunan jalan di desa pulau gambar kecamatan seabjadi kabupaten Serdang berdagai, Permasalahan dalam penelitian ini yakni belum meratanya pembangunan antar dusun di desa pulau gambar. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa

belum mampu pemerataan pembangunan karena wilayahnya sudah menjadi daerah aliran sungai dan milik perseorang, faktor penghambat sumber daya keuangan dan ketersediaan lahan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arifah et al., 2023) dengan judul peran kepala desa terhadap Pembangunan infrastruktur jalan desa pulau sejuk kecamatan datuk limapuluh kabupaten batu bara, Permasalahan dalam penelitian ini yakni menghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Jenis penelitian bersifat deskriptif pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah direncanakan dengan baik namun dalam pelaksanaan pembangunan jalan masih belum dilaksanakan dan untuk pengawasan secara langsung mampu tidak langsung, kepala desa dengan aparat desa dalam pembangunan jalan belum terlasanakan dikarekanan belum ada perbaikan jalan, kepada kepala desa pulau sejuk harus memperhatikan pembangunan jalan agar pelaksanaan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widea et al., 2018) dengan judul peran pemerintah desa dalam Pembangunan infrastruktur jalan desa lasung batu kecamatan piringin kabupaten balangan, Permasalahan dalam penelitian ini yakni terhambatnya Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infastruktur Jalan Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa lasung batu berupa jalan keperkebunan cukup berperan atau 47,43%. Faktor penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu kurangnya dorongan-dorongan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Akib & Tepare, 2017) dengan judul peranan pemerintah desa dalam Pembangunan infrastruktur jalan di desa malitu kecamatan poso pesisir Selatan kabupaten poso, Permasalahan dalam penelitian ini yakni faktor – faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah terbatasnya sarana komunikasi dan sumber daya manusia atau SDM, Jenis penelitian ini bersifat deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malitu belum berperan secara efektif, khususnya pengawasan. Hal ini dilihat dari hasil yang sudah ada bahwa adanya jalan kantong produksi yang tidak selesai dikerjakan. Sedangkan, faktor – faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah terbatasnya sarana komunikasi dan sumber daya manusia atau SDM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam bidang perencanaan, peran pemerintah Desa Malitu sudah berperan secara aktif. Dalam proses pelaksanaan belum berjalan dengan baik dan dalam bidang pengawasan, pemerintah Desa Malitu, belum melakukan pengawasan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rowlando Houtsma Siboro, 2022) dengan judul peran pemerintah desa dalam Pembangunan infrastruktur di desa pematang Panjang kecamatan air putih kabupaten batu bara, Permasalahan dalam penelitian ini yakni hambatan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan peranan dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan lancar dan baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan dengan usaha usaha yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wildasar et al., 2020) dengan judul peran kepala desa dalam Pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Permasalahan dalam penelitian ini yakni infrastruktur di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian bersifat deskriptif pendekatan kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di jalan desa sudah cukup baik namun perlu untuk

ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Motivator**

Berdasarkan penelitian dari (Hafizah Ulfah & Wahyu Subad, 2021) tidak optimal dengan penelitian dari peneliti, bahwa mengenai peran kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan disiplin waktu aparatur desa dari indikator pendorong semangat dikategorikan berperan, dari indikator membina dikategorikan berperan, dari indikator memberi pengaruh dikategorikan cukup berperan, dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa mengenai peran kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan disiplin waktu aparatur desa pada kantor desa juai kecamatan tanjung kabupaten tabalong dikategorikan berperan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa dan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dolong A menunjukkan dinamika yang beragam. Di satu sisi, Pemerintah Desa mengklaim telah melakukan musyawarah secara terbuka, menghidupkan kembali budaya kerja bakti dan gotong royong, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Sekretaris Desa juga berperan aktif dalam menyosialisasikan manfaat pembangunan melalui media dan pendekatan langsung kepada warga. Ketua BPD menyatakan bahwa aspirasi warga disalurkan melalui forum Musdes dan menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan. Namun, di sisi lain, terdapat keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa kurangnya dorongan, motivasi, dan dukungan terhadap pembangunan jalan akibat kepemimpinan Kepala Desa yang dinilai tidak responsif dan tidak menetap di desa. Pembangunan dinilai lebih terfokus pada proyek fisik lain seperti tanggul dan gedung, tanpa proses musyawarah terbuka terkait kebutuhan jalan desa, sehingga mencerminkan lemahnya partisipasi dan kepemimpinan dalam menjawab aspirasi warga secara menyeluruh.

### **Fasilitator**

Berdasarkan penelitian dari (Irawan & Rijali, 2020), tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Dari hasil angket akhir peran sebagai Fasilitator tersebut terlihat 61.11% dari jumlah presentase jawaban responden dengan hasil Cukup Berperan. "Peran kepala desa selama ini dalam menyediakan peralatan saat kegiatan berlangsung cukup baik dimana alat-alat seperti cangkul, sekrap, argo dll sudah ada di gudang desa dimana peralatan tersebut bersumber dari dana desa".

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, terlihat adanya dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dolong A. Di satu sisi, pemerintah desa menunjukkan komitmen dengan mengalokasikan dana desa, menyusun RAB, menyewa alat berat, serta menjalin kerja sama dengan pihak kecamatan dan melibatkan warga serta BPD dalam proses perencanaan dan pelaporan secara transparan. Namun di sisi lain, muncul pula indikasi lemahnya peran fasilitator dari pemerintah desa, terutama kepala desa yang dinilai kurang hadir dan tidak aktif dalam memfasilitasi musyawarah maupun kebutuhan warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa yang dianggap tidak responsif, sehingga menghambat terciptanya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

### **Mobilisator**

Berdasarkan penelitian dari (Arieska et al., 2024) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa kecil sudah

berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perannya sebagai Mobilisator hal ini terlihat dari memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pelayanan khususnya tata cara pengurusan suatu administrasi maupun persyaratan administrasi yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian pemerintah desa kecil telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai Mobilisator.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dolong A berjalan dengan dinamika yang kontradiktif. Di satu sisi, terdapat inisiatif positif dari sebagian elemen pemerintah desa dan BPD yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah terbuka, pelaporan rutin, serta pelibatan warga dalam pengawasan proyek dan kerja bakti. Praktik-praktik ini mencerminkan penerapan prinsip good governance dan penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Namun, di sisi lain, lemahnya kepemimpinan kepala desa dan sekretaris desa yang jarang berada di wilayah serta minimnya tanggapan terhadap permasalahan jalan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakhadiran mereka dalam menjalankan fungsi fasilitator dan penggerak pembangunan mencerminkan rendahnya tanggung jawab dan komitmen terhadap kebutuhan dasar warga, sehingga menghambat kemajuan pembangunan yang seharusnya partisipatif dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pemerintah Desa Dolong A telah menunjukkan perannya sebagai motivator dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah dan gotong royong, namun motivasi tersebut belum merata karena lemahnya kehadiran dan keterlibatan langsung dari kepala desa dan sekretaris desa. Sebagai fasilitator, pemerintah telah mengalokasikan dana desa, menyediakan alat berat, dan menyusun RAB, tetapi belum sepenuhnya membuka ruang diskusi yang inklusif dan menjembatani aspirasi warga secara optimal. Sementara itu, peran sebagai mobilisator juga belum berjalan maksimal, ditandai dengan minimnya kehadiran pimpinan desa serta rendahnya inisiatif kolektif, sehingga kegiatan pembangunan menjadi pasif dan bergantung pada pihak eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, K., & Tepar, O. A. (2017). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 29–32. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/221>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arieska, Nurfitri, & Gustian, B. (2024). PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA KECIL KECAMATAN AIR HANGAT BARAT KABUPATEN KERINCI. 6(6), 1–23.
- Arifah, Budi, H., & Marlina, D. (2023). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi. *Jurnal Ilmu Pemerintah, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 157–164. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i2.2918>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Ferlita, S., Saepudin, E. A., Maharani, P. S., Kurniawan, I. P., Susilawati, S., & Al Fauzan, R. Z. (2024). Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 189–195.
- Hafizah Ulfah, & Wahyu Subad. (2021). Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Disiplin Waktu Aparatur Desa Pada Kantor Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB (Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis)*, 4, 1361–1374.
- Hasan, K. (2023). The Influence of Transformational Leadership and Work Motivation on Employee Performance: Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi

- Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(1), 39–48.
- Henriawan, N. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Era Milenial (Studi Kasus Pemberdayaan Pemuda di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone)*. Universitas Hasanuddin.
- irawan, R., & Rijali, S. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Japb*, 3(2), 559. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/298%0Ahttps://www.jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/download/298/243>
- Lifia, A. (2023). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI DESA PULAU GAMBAR KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI*.
- Nengsi, W. (2021). *Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Balambano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
- Nurdiaman, M., Purnawan, A., & Sudirman, R. F. L. (2020). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sukatani Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 25–32.
- Priyanto, D. M. (2021). *Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*.
- Rowlando Houtsma Siboro. (2022). *PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR di DESA PEMATANG PANJANG KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA*. Universitas Medan Area.
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(2), 834–839.
- Siagian, S. P., Sembiring, L. L., & Saota, F. (2022). Pengaruh Program Dana Desa “Padat Karya Tunai” Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa. *Jurnal Governance Opinion*, 7(1), 28–39.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Sugiarti, R. (2023). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif Siyasa Syar’iyyah* peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif Siyasa S. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Sulastri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi Di Daerah. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 4(1), 22–28.
- Widea, W., Budi, S., & Muhammad Riyandi, F. (2018). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan*.
- Wildasar, Budi, S., & Ansyari, M. (2020). Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang. *Unismuh*, 1, 514.